

ABSTRAK

ANALISIS KETERGANTUNGAN FISKAL KABUPATEN/KOTA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

AGUSTINUS EKO KURNIAWAN

Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Lampung tergolong rendah, khususnya pada daerah otonomi baru yang terbentuk pada tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketergantungan fiskal daerah, menganalisis ketergantungan fiskal daerah terkait dengan sektor lapangan usaha dominan, dan menganalisis rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Pengambilan data pada kurun waktu tahun 2016-2021. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis dekriptif kuantitatif, melalui penghitungan *Fiscal Autonomy Index*, yang dikembangkan oleh Hunter dan disesuaikan dengan struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ketergantungan fiskal daerah yang diteliti berada pada status ketergantungan tinggi atau belum mandiri, kecuali Kota Metro yang pada tahun 2021 berhasil naik status menjadi menuju kemandirian. Selanjutnya, seluruh daerah dengan sektor lapangan usaha dominan sektor primer yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian memiliki status ketergantungan tinggi atau belum mandiri. Lebih lanjut, bahwa rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB, di seluruh daerah yang diteliti masih sangat rendah. Upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah meliputi penghitungan potensi riil pajak dan retribusi daerah, pengembangan sektor-sektor potensial dalam peningkatan pendapatan sektor pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan teknologi informasi, penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah, percepatan investasi daerah, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan belanja modal infrastruktur.

Kata Kunci : ketergantungan fiskal, pembangunan daerah, rasio pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB

ABSTRACT

ANALYSIS OF DISTRICT/CITY FISCAL DEPENDENCE IN REGIONAL DEVELOPMENT IN LAMPUNG PROVINCE

by

AGUSTINUS EKO KURNIAWAN

The contribution of original local government revenue to total regional revenue in regencies and cities in Lampung Province is relatively low, especially in the new autonomous regions that were formed in 1999. This study aims to analyze regional fiscal dependence, analyze regional fiscal dependence related to the dominant business sector, and analyze the ratio of regional taxes and retribution to GRDP. This study uses a quantitative descriptive method. Data collection in the period 2016-2021. The analytical method used is descriptive quantitative analysis, through the calculation of the Fiscal Autonomy Index, which was developed by Hunter and adapted to the structure of the regional revenue and expenditure budget. The results of the study indicate that the value of the fiscal dependence of the regions studied is in a high dependency status or not yet independent, except for Metro City which in 2021 managed to increase its status to become self-reliant. Furthermore, all regions with dominant primary sector business sectors, namely the agriculture, forestry, and fisheries sectors and the mining and quarrying sectors have a high dependency status or are not yet independent. The ratio of regional taxes and retribution to GRDP, in all regions studied is still very low. Efforts that need to be made by local governments to increase regional fiscal independence include calculating the real potential of regional taxes and levies, developing potential sectors in increasing regional tax and retribution sector revenues, utilizing information technology, adjusting regional taxes and levies, accelerating regional investment, developing local economy, and increased infrastructure capital spending.

Keywords: fiscal dependence, regional development, the ratio of regional taxes and retribution to GRDP